

fungsi pembinaan dan pengawasan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat terhadap pemebentukan produk hukum daerah dapat berjalan dengan maksimal dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aminuddin Ilmar. 2013. *Hukum Tata Pemerintahan*. Identitas Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Amir Ilyas dan Muhammad Nursal. 2016. *Kumpulan Asas-Asas Hukum*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Andi Pangeran Moenta dan Syafa'at Anugrah Pradana. 2018. *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. PT RajaGrafindo Persada. Depok.
- Bagir Manan. 2004. *Hukum Positif Indonesia: Suatu Kajian Teoritik*. FH-Ull Press. Yogyakarta.
- Miftah Thoha. 2001. *Pembinaan organisasi*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Muh. Hasrul. 2015. *Kekuasaan Gubernur di Daerah*. Mahakarya Renggang Offset. Yogyakarta.
- Mukhti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Ni'matul Huda. 2009. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Nusa Media. Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah. 2005. *Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Pustaka Setia. Bandung.
- Prayudi Atmodusirjo. 1992. *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Suriansyah Murhani. 2008. *Aspek Hukum Pengawasan Pemerintah Daerah*. Laksbang Mediatama. Yogyakarta.

Suryo Sakti Hadiwijoyo. 2011. *Gubernur*. Graha Ilmu. Jakarta.

Syaiful Anwar. 2004. *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*. Glora Madani Press. Jakarta.

Jurnal

Ateng Syafrudin. 2000. *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*. Jurnal Pro Justisia Edisi IV Universitas Parahyangan. Bandung.

Husin Ilyas. *Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Pusat Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Daerah*. Jurnal Bina Praja. Universitas Muara Bango Jambi. Vol. 4. Nomor 4 Desember 2012.

Yuri Sulisty. *Pengawasan Pemerintah Terhadap Produk Hukum Daerah ((Peraturan Daerah) Melalui Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. e-Journal Lentera Hukum. April 2014.

Makalah

Bagir Manan. Makalah: *“Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah”*. Fakultas Hukum Universitas Padjajaran. Bandung. 13 Mei 2000.

Peraturan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Internet

Andi Nur Aminah, 2016, Raja Gowa: Perda Lembaga Adat Daerah Tidak Sah,
<https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/09/12/ode0jf384-raja-gowa-perda-lembaga-adat-tidak-sah> diakses tanggal 31 Mei 2020, pukul: 16:31 WITA (koran online)

Abdul Salam Taba, 2016, Ketika Peraturan Daerah Menuai Konflik,
<https://investor.id/archive/ketika-peraturan-daerah-menuai-konflik> diakses tanggal 31 Mei 2020, pukul: 16:35 WITA (koran online)